

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2018-2022, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2018-2022 mendapatkan tingkat rasio kemandirian Rendah Sekali dan tergolong dalam pola instruktif dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.
2. Rasio Efektivitas dari tahun 2018-2022 mendapatkan hasil yang fluktuasi dimana pada tahun 2019 mendapatkan hasil sangat efektif dimana persentasenya berada di atas 100% sedangkan pada tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan hasil Efektif, Cukup Efektif dan Kurang efektif karena persentasenya berada di bawah 100% dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran, sedangkan jika realisasi lebih besar dari anggaran dapat dikatakan efektif karena pemerintah tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan.
3. Rasio Efisiensi dari tahun 2018-2022 mendapatkan hasil yang tidak baik karena berada dalam kriteria tidak efisien dan kurang efisien dikarenakan belanja daerah yang lebih besar dari pendapatan daerah.
4. Rasio Keserasian dari tahun 2018-2022 mendapatkan hasil tidak baik karena tingkat keserasian antara dua aspek tersebut rendah atau tidak memadai sehingga mendapatkan hasil yang tidak serasi.

## 5.2. Implikasi Teoritis

Berikut ini dijelaskan implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian:

Yulinchton, dkk (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019 Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian pemerintah daerah. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengelola PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Pemerintah Kabupaten Tegal memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah. Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Kondisi tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja operasional daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuasi dan berada pada kategori rendah yang diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Lebuan (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2015-2019. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pendapatan dari tahun 2015-2019 dikategorikan efektif, pendapatan

asli daerah dikategorikan cukup efektif, dana perimbangan efektif, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikategorikan sangat efektif. Efektifitas belanja dari tahun 2015-2019 dikategorikan efektif, belanja langsung dikategorikan cukup efektif, belanja tidak langsung dikategorikan efektif. Penerimaan daerah dikategorikan efektif, pengeluaran daerah dilatakan efektif. Rata-rata tingkat efesiensi dari tahun 2015-2019 sebesar 100,60% yang berarti tidak efisien.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara**

Dengan diketahuinya hasil dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efesiensi dan Rasio Keserasian, maka diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana external atau bantuan dari Pemerintah Pusat dengan cara mengelola Pendapatan Asli Daerah secara spesifik yaitu dengan memperbaiki Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD sehingga potensi tersebut dapat dikelolakan dengan baik untuk meningkatkan PAD Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan dapat mempertahankan Efektivitas PAD dengan cara terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan mengenai tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan data yang lebih banyak dan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena peneliti ini mengambil satu kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara.